

**SKRIPSI**

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM**

***THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY USING INTERNAL  
GOVERNMENT CONTROL SYSTEMS TOWARDS THE QUALITY OF THE  
FINANCIAL STATEMENTS OF MATARAM CITY GOVERNMENT***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Administrasi Bisnis (S.AB) Pada Program Studi Administrasi Bisnis  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram



**Disusun oleh :**

**RESA RESYITA**  
**216120107**

**KONSENTRASI PERBANKAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2020**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM**

***THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY USING INTERNAL  
GOVERNMENT CONTROL SYSTEMS TOWARDS THE QUALITY OF THE  
FINANCIAL STATEMENTS OF MATARAM CITY GOVERNMENT***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Administrasi Bisnis (S.AB) Pada Program Studi Administrasi Bisnis  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram



**Disusun oleh :**

**RESA RESYITA**  
**216120107**

**KONSENTRASI PERBANKAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM**  
**PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS**  
**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RESA RESYITA**  
**NIM: 216120107**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana**  
**Administrasi Bisnis (S.AB) Pada Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas**  
**Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan:**

**Mataram, 11 Februari 2020**

**Dosen Pembimbing I**



**Drs. Amil, MM**  
**NIDN. 083112604**

**Dosen Pembimbing II**

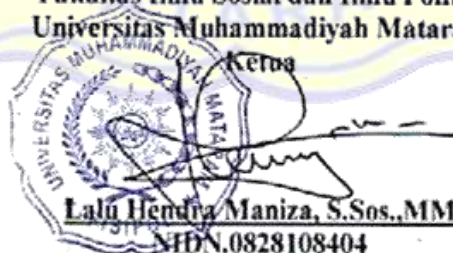


**Kukuh Tondovekti, S.E., M.BA**  
**NIDN. 0814128401**

**Mengetahui,**

**Program Studi Administrasi Bisnis**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Ketua**

  
**Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM**  
**NIDN.0828108404**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM**

**SKRIPSI**

Oleh :

**RESA RESYITA**

**NIM: 216120107**

Naskah Skripsi ini telah di uji dan di pertahankan dalam sidang ujian yang diselenggarakan:

**Mataram, 11 Februari 2020**

Dinyatakan Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Adminitrasi Bisnis (S.AB) Di Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

**Dewan Penguji**

1. Penguji Utama  
**Drs. Amil, MM**  
NIDN : 083112604
2. Penguji Pendamping  
**Kukuh Tondovekti, S.E., M.BA**  
NIDN : 0814128401
3. Penguji Penetral  
**Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM**  
NIDN : 0828108404

**Tanda Tangan**



**Mengetahui:**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan**



**\* Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Resa Resyita

NIM : 216120107

Judul Skripsi : "PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA MATARAM"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram, maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, dan sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, Februari 2020

Penulis,



Resa Resyita

NIM. 216120107



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RESA, RESYITA
NIM : 216120107
Tempat/Tgl Lahir : TAREH, 30 Mei 1998
Program Studi : Administrasi Bisnis
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085338599455 / resaresyita30@gmail.com
Jenis Penelitian : [X]Skripsi [ ]KTI [ ]

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KEAHTAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

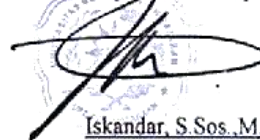
Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 17/02/2020



RESA RESYITA
NIM. 216120107

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

## MOTO

*“Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam.”*

*– R.A. Kartini*

*“Ketika kamu merasa sendirian, ingatkan diri bahwa Allah sedang menjauhkan mereka darimu, agar hanya ada kau dan Allah.”*

*Ketika kau sedang mengalami kesusahan dan bertanya-tanya kemana Allah, cukup ingat bahwa seorang guru selalu diam saat ujian berjalan.”*

*– Nourman Ali Khan*



## PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Seorang kakak tingkat di Universitas Muhammadiyah Mataram pernah berkata, jika mempunyai sebuah tujuan, maka buatlah batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga hal inilah yang membuat penulis memacu dirinya kurang dari batas maksimal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, diwaktu yang kurang dari 4 tahun.

Skripsi atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

- Ayahanda dan (Almarhum) Ibu Tercinta M. Yasin Asmawati sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga untuk semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. Dan untuk Ibu Terimakasih atas limpahan kasih sayang semasa hidupnya dan memberikan rasa rindu yang berarti. I love You So Much Ayah Ibu :\*
- My Lovely Brother Yuda Nugraha tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama, walaupun sering bertengkartapi hal itu selalu menjadi



warna yang tak akan bisa tergantikan, terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.

- Keluarga Besar (Almarhum) Kakek Ahmad Ambe, Nenek Aminah, Aunti Ikha, Mpok, dan semua keluarga yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih untuk doa, nasehat, masukan dan semangatnya selama ini. Khusus nya untuk Aunti Ikha yang sudah membiayai kuliah saya terimakasih yang tak terhingga.
- Dosen Pembimbing tersabar Ayahanda Drs. Amil, MM dan Pak Kukuh Tondoyekti, S.E., M.BA yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terimakasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada kami.
- Spesial buat seseorang !!! Untuk seseorang di relung hati yang selalu ada mendengar ceritaku, keluh kesahku percayalah bahwa hanya ada satu nama yang selalu ku sebut-sebut dalam do'aku, semoga keyakinan dan takdir terwujud, insyaallah jodohnya kita bertemu atas ridho dan izin Allah S.W.T
- Squad yang serasa seperti saudara kandung, Retno Larasati, Nia Haryati, Ayu Wulandari, Irayanti, Baiq. Siti Zahara, Eti Kurnia Suci lainnya yang sudah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
- Sahabat KKN 12, Kiki Intan Berliani, Kiki Anggriani, Rossihan Zulby, Rahmad Naufalda, Lalu Riki Ardiansyah, Rosni, M. Bayu Romza, Fikri

Acenk, Muhammad Azhary Ramadhan, Susi Ratna Sari terimakasih untuk kebersamaan dan persahabatan yang kalian ajarkan kepada penulis.

- My Support System Deva Okta Amelia terimakasih sudah mau direpotkan selama penelitian sampai penyusunan skripsi ini selesai.
- Adik Mirda Yulanda teman kos serasa saudara terimakasih sudah selalu support dalam penyusunan skripsi ini
- Sahabat Skripsi Kapriandani, Muhammad Jaelani, Safruddin, Kakak Eri yang sudah memberikan masukan, semangat, saran, bimbingan dalam mengerjakan skripsi ini.
- Semua teman-teman Perbankan Administrasi Bisnis 2016 terimakasih atas kebersamannya selama 3,5 tahun ini di bangku perkuliahan.
- Almamater Hijau Tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua

“Your Dreams today, can be your future tomorrow”

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram”**. Tak lupa Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan gigihnya mengarahkan umat manusia melangkah dari zaman kebiadaban menuju aman penuh peradaban.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Administrai Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam hal ini penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih untuk kedua orang tua tercinta Bapak M. Yasin dan (Almh) ibu Asmawatitercinta yang tak pernah bosan dan tetap bersabar mendidik, membesarkan, memberi dukungan, semangat dan selalu senantiasa mendoakan penulis.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penulis. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Mataram.
2. Bapak Dr.H. Muhammad Ali.,M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dedy Iswanto, S.T., M.M selaku wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdiyah Mataram.
4. Bapak Lalu Hendra Maniza.,S.Sos.,M.M selaku Kaprodi Administrasi Bisnis Sekaligus Pembimbing Akademik Penulis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Ibu Baiq. Reinelda Tri Yunarni selaku Sekretaris Kaprodi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Drs.Amil, MM selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Kukuh Tondoyekti.,S.E.,M.BA selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih Kepada Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Jajaran Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang memberikan Ilmu, membimbing Penulis dan Motivasi.
9. Terimakasih kepada Kedua orang tua penulis Bapak M.Yasin dan (Almh) Ibu Asmawati yang selalu dengan penuh rasa ikhlas mendoakan anaknya melalui doa, motivasi dan tindakan untuk mencapai cita-cita.
10. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis. Terima kasih telah menjadi guru bagi penulis. Semoga kita dapat mengejar dunia dan memperoleh surga sebagai hadiahnya. Amin.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Mataram, Februari 2020

Penulis

RESA RESYITA  
216120107



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 LatarBelakang .....	1
1.2 RumusanMasalah .....	10
1.3 TujuanPenelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.4.1 Manfaat Secara Akademik .....	11
1.4.2 Manfaat Secara Teoritis .....	11
1.4.3 Manfaat Secara Paktis .....	12
<b>BAB II TINJAUANPUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 PenelitianTerdahulu .....	13
2.2 LandasanTeori .....	14
2.2.1 Teknologi Informasi .....	14
2.2.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah .....	14
2.2.3 Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah .....	17

2.2.4 Kualitas Laporan Keuangan .....	19
2.2.5 Karakteristik Laporan Keuangan.....	24
2.3 RerangkaKonseptual Dan PengembanganHipotesis .....	27
2.3.1 Rerangka Konsptual .....	27
2.3.2 Pengembangan Hipotesis.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 PendekatanPenelitian .....	32
3.2 JenisPenelitian .....	32
3.3 Lokasi Dan WaktuPenelitian .....	33
3.3.1 LokasiPenelitian .....	33
3.3.2 WaktuPenelitian.....	33
3.4 Populasi Dan Sampel .....	33
3.4.1 Populasi .....	33
3.4.2 Sampel .....	34
3.5 Jenis Dan Sumber Data.....	34
3.5.1 Jenis Data.....	34
3.5.2 Sumber Data .....	34
3.6 Definisi Oprasional Dan Variable .....	35
3.6.1 Variabel Identifikasi .....	35
3.6.2 Definisi Oprasional Variabel .....	36
3.7 Tehnik Pengumpulan Data .....	39
3.8. Tehnik Analisis Data .....	39
3.8.1 Analisis Statistic Dan Pengujian Hipotesis .....	41
3.8.2 Uji Kualitas Data .....	41
3.8.3 Uji Asumsi Klasik .....	41
3.8.4 Analisis Regresi Linear Berganda .....	42
3.8.5 Pengujian Hipotesis .....	43

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	46
4.1.1 Deskripsi Data .....	46
4.1.2 Analisis Deskriptif .....	49
4.1.3 Analisis Data .....	51
4.2 Pembahasan .....	62
4.2.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah .....	62
4.2.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah .....	64
4.2.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah .....	65
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1.</b>	Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2017 .....	6
<b>Tabel 1.2.</b>	Perkembangan opini LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017 .....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 4.1.	Data Sampel Penelitian .....	46
Tabel 4.2.	Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	47
Tabel 4.3	Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	47
Tabel 4.4	Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja .....	48
Tabel 4.5	Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	49
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Masing-Masing Item Pernyataan .....	50
Tabel 4.7	Hasil Uji Reliabilitas .....	52
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov .....	53
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolinearitas .....	54
Tabel 4.10	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	56
Tabel 4.11	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	58
Tabel 4.12	Hasil Uji Statistik T .....	59
Tabel 4.13	Hasil Uji Statistik F .....	60
Tabel 4.14	Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis .....	62



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1.</b> Rerangka Konseptual Penelitian .....	26
<b>Gambar 4.1</b> Hasil Uji Scatterplot.....	55



# **PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM**

Resya Resyita<sup>1</sup>, Drs. Amil, MM<sup>2</sup>, Kukuh Todoyekti, SE., M.BA<sup>3</sup>

Mahasiswa<sup>1</sup>, Pembimbing Utama<sup>2</sup>, Pendamping<sup>3</sup>  
Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kota Mataram. Sehingga variable ini terdiri dari 2 Variabel independen Pemanfaatan teknologi informasi (X1), sistem pengendalian internal pemerintah (X2) dan variabel dependen kualitas laporan keuangan (Y).

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan sampel sebanyak 120 orang. Melalui pembagian kuesioner kepada 30 OPD di Kota Mataram, kepada seluruh pegawai pengelolaan keuangan yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data menggunakan model regresi linier berganda, Sebelum melakukan analisis regresi maka harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik. Sehingga bisa mendapatkan hasil ydengn tepat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tabel uji signifikansi simultan (uji statistik F) atau hasil pengujian ANOVA atau  $F_{test}$  dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 23.790 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka model persamaan regresi ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Mataram.

**Kata Kunci : Pemanfaatan Teknologi, Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal.**

**THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY USING  
INTERNAL GOVERNMENT CONTROL SYSTEMS TOWARDS THE  
QUALITY OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF MATARAM CITY  
GOVERNMENT**

**Resa Resyita<sup>1</sup>, Drs. Amil, M.M<sup>2</sup>, Kukuh Todoyekti, SE., M.BA<sup>3</sup>  
Student<sup>1</sup>, Main Advisor<sup>2</sup>, Companion<sup>3</sup>  
Business Administration Study Program Faculty of Social and Political  
Sciences Muhammadiyah University of Mataram**

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the effect of the use of information technology and the government's internal control system on the quality of government financial reports in the city of Mataram. This research variable consists of independent variables, namely the use of information technology (X1), the government's internal control system (X2), and the dependent variable, namely the quality of financial statements (Y).

This research is a quantitative study using a sample of 120 people. Data collection was carried out by distributing questionnaires to 30 DPOs in the city of Mataram, all financial management employees, namely the Financial Administration Officer (PPK), the Technical Implementation Activities Officer (PPTK), the Treasurer of Revenue, and the Treasurer of Expenditures. Data analysis of this research was carried out using multiple linear regression models. Prior to the regression analysis, a validity test, a reliability test, and a classic assumption test were conducted to obtain the right results.

The results showed a simultaneous significance test table (statistical test F) or ANOVA or F\_test test results showed that the value of F\_ (count) was 23,790 with a probability of 0,000. Because the probability of 0,000 is smaller than 0.05, it can be concluded that simultaneously the independent variable, namely the utilization of information technology and the government's internal control system, together affect the dependent variable, namely the quality of the financial statements of the local government of Mataram City.

**Keywords: technology utilization, financial report quality, internal control system.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan manajemen pemerintah pusat dan daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). Hal tersebut dinilai penting karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemampuan manajemen untuk mengkoordinasi kebijakan tersebut dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah secara efisien dan efektif. Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur pertanggungjawaban kinerjanya, baik dari segi kinerja individu, kinerja unit kerja dan kinerja instansi, dan juga kinerja pemerintah keseluruhannya (Nazir dan Oktari, 2011).

Organisasi sektor publik yang sering dikaitkan dengan pemerintahan atau badan usaha yang kepemilikannya berada di tangan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang (Nurillah, 2014). Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Besarnya tuntutan tersebut lembaga pemerintah bertanggung jawab memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Soimah, 2014: 46-57).

Sebagai wujud pertanggungjawaban tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan



keuangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya yang nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, publikasi informasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan para pemakai informasi. Informasi dikatakan bermanfaat jika informasi tersebut mampu dipahami, dapat dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi (Andriani, 2010). Berdasarkan PP 71

Tahun 2010 pihak yang menggunakan laporan keuangan pemerintahan adalah masyarakat, lembaga pemeriksa, lembaga pengawas, wakil rakyat, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, dan pemerintah.

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 diungkapkan bahwa, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: (a) Relevan, (b) Andal, (c) Dapat dibandingkan dan (d) Dapat dipahami.

Apabila informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, kekurangan penerimaan kas daerah, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakfektifan. Apabila informasi yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan perundang-undangan, maka Laporan Keuangan tersebut dapat di pertanggungjawabkan.

Faktor yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah adalah Pemanfaatan teknologi Informasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah

No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Untuk mewujudkan terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyampaikan Informasi Keuangan Daerah kepada publik. Pemerintah perlu mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Muncul suatu pertanyaan apakah sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap pemerintahan daerah sudah memiliki kemampuan dan kapasitas

untuk mengoperasikan teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah.

Telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2003), akan tetapi penerapan teknologi informasi memerlukan biaya yang tidak murah sehingga teknologi informasi yang ada belum tentu mampu untuk dapat dioperasikan dengan maksimal yang nantinya akan menimbulkan biaya yang mahal.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan selain pemanfaatan teknologi informasi adalah sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP), dalam PP tersebut mengungkapkan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya: (a) efektivitas dan efisiensi pencapaian kebijakan pemerintahan negara; (b) keandalan Laporan Keuangan; (c) pengamanan aset negara; dan (d) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Isu tentang sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) mendapat perhatian cukup besar belakangan ini, sehingga banyak lembaga pemantau diantaranya BPK mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan oleh pemerintahan, yang dapat membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD),

(Nurillah, 2014). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya akan dinilai oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang berupa opini. Terdapat empat penilaian opini yang diberikan oleh pengawas yaitu: (1) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), (2) WDP (Wajar Dengan Pengecualian), (3) Opini Tidak Wajar, dan (4) TMP (Tidak Menyatakan Pendapat).

Hasil pemeriksaan BPK atas 542 LKPD ditemukan 6.222 kelemahan SPI yang terdiri atas 2.083 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.887 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.252 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2017 terlihat dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.1.**

**Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2017**

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
<i>Sistem Pengendalian Internal</i>		
1.	permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.083
2.	permasalahan kelemahan system pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.887
3.	permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern	1.252
	<b>Jumlah</b>	<b>6.222</b>

(sumber: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) – IHPS I Tahun 2018)



Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK, perkembangan opini LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017 dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2.**

**Perkembangan opini LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017**

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Kab. Bima	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2.	Kab. Dompu	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Kab.Lombok Barat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kab.Lombok Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kab. Lombok Timur	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
6.	Kab. Lombok Utara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Kab. Sumbawa	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	Kab. Sumbawa Barat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Kota Bima	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	Kota Mataram	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

(sumber: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) – IHPS I Tahun 2018)

Berdasarkan data IHSP I Tahun 2018 BPK disebutkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut mengungkap bahwa Kota Mataram dapat meningkatkan opininya dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di TA 2013 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di TA 2014 – TA 2017.

Dengan adanya peningkatan opini yang diperoleh Kota Mataram dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di TA 2013 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di TA 2014 – TA 2017, timbul suatu pertanyaan apakah laporan keuangan yang diterbitkan juga menunjukkan adanya kualitas yang baik sehingga dapat dipergunakan dengan banyak tujuan dari pengguna yang

berbeda. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya tuntutan dari elemen masyarakat salah satunya pada kasus dugaan penyimpangan pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram. Lalu Kasus dugaan penjualan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram yang dikelola oleh PT Pasifik Cilinaya Fantasy (PCF) dan diduga kuat telah beralih kepemilikannya tanpa sepengetahuan pihak pemkot, (RadarLombok, 20/02/2017). Hal ini mengindikasikan bahwa masih lemahnya sistem pengendalian intern dalam pemerintahan.

Pemerintahan Kota Mataram memiliki 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana masing-masing OPD mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan organisasi salah satunya adalah menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemilihan OPD di Kota Mataram sebagai objek penelitian dikarenakan pemanfaatan teknologi informasi yang telah diwajibkan untuk diterapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 yang bertujuan untuk menunjang kinerja OPD apakah sejalan dengan kemampuan sumber daya manusia untuk mengoperasikan sistem tersebut. Selain itu, peningkatan opini yang diberikan oleh BPK dari WDP menjadi WTP di TA 2014 – TA 2017 akan tetapi, di tahun yang sama masih adanya penyelewengan asset daerah yang menimbulkan pertanyaan dari elemen masyarakat mengenai kualitas laporan keuangan OPD di Kota Mataram.

Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya, Yosefrinaldi (2013) hasil penelitiannya mengatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2018) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian mengenai sistem pengendalian internal pemerintah pernah dilakukan oleh Mahaputra, dkk (2014) hasil penelitiannya diketahui bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi akuntansi pada kualitas informasi pelaporan keuangan. Hasil penelitian tersebut tidak berbanding lurus dengan penelitian yang dilakukan oleh Yendrawati (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas dan dengan adanya perbedaan hasil penelitian yang hasilnya bervariasi yaitu berpengaruh dan tidak berpengaruh dari berbagai penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Ingin Mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram.
2. Ingin Mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram.
3. Ingin Mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Secara Akademik**

Memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar studi pada program strata satu (SI) Administrasi Bisnis pada Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram. Hasil penelitian ini dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya, dan akuntansi sektor publik di Indonesia pada khususnya.

### **1.4.2. Manfaat Secara Teoritis**

Dapat digunakan oleh para intelektual dan juga oleh para pihak berkepentingan baik pihak pemerintah maupun pihak lainnya yang memerlukan informasi berkaitan dengan penelitian Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam memperbaiki Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

### **1.4.3. Manfaat Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga sektor publik untuk dapat memecahkan permasalahan secara praktis dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah serta diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah Kota Mataram untuk mengetahui arti pentingnya



Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal  
pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

Nama / Judul / Tahun	Metode	Temuan	Perbedaan
Winidyaningrum dan Rahmawati  Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kehandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah  (2010)	Kuantitatif	Hasil penelitiannya menyatakan Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatanwaktuan. Pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan dan ketepatanwaktuan.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Variabel independen tidak menggunakan Sumber Daya Manusia.</li><li>• Variabel dependen tidak menggunakan Kehandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.</li><li>• Peneliti tidak menggunakan variabel intervening.</li></ul>
Yosefrinaldi "Pengaruh Kapasitas	Kuantitatif	Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Variabel independen tidak menggunakan</li></ul>

<p>Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat)". (2013)</p>		<p>kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>	<p>Kapasitas Sumber Daya Manusia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti tidak menggunakan variabel intervening.</li> <li>• Objek dan tahun penelitian.</li> </ul>
<p>Ariesta (2013)</p> <p>“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat”.</p> <p>(2013)</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatanteknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan, serta pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen tidak menggunakan Kualitas Sumber Daya Manusia.</li> <li>• Peneliti tidak menggunakan variabel intervening.</li> <li>• Objek dan tahun penelitian.</li> </ul>

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teknologi Informasi

Pengertian teknologi informasi menurut (Muryono dan Istiana 2008:

64) adalah tata cara atau sistem yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan atau informasi. Seiring dengan perkembangan computer dan peralatan komunikasi modern, pengertian teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan perangkat computer

sebagai alat untuk memproses, menyajikan, serta mengelola data dan informasi dengan berbasis pada peralatan komunikasi.

Menurut Hamzah 2011: 65) pemanfaatan teknologi informasi termasuk didalamnya pengolahan data, pengolahan informasi, serta proses kerja secara elektronik dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan adanya kemudahan untuk mengakses informasi keuangan. Selain itu, pengolahan data dengan bantuan komputer jelas akan mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan.

Memanfaatkan kemajuan teknologi tidak hanya dalam teknologi komputer. Jaringan internet juga dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta pelayanan kepada masyarakat umum, salah satunya dengan kemudahan untuk mengakses profil pemerintah daerah melalui situs resmi pemerintah daerah terkait. Dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa situs adalah sebuah cara untuk menampilkan profil pemerintah daerah di internet dengan tujuan antara lain menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat. Selain akses profil pemerintah daerah yang terkait, dalam situs resmi tersebut masyarakat dapat mengakses mengenai informasi keuangan pemerintah daerah.

Hal ini juga telah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 bahwa, penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

diinformasikan melalui situs resmi pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat (Soimah, 2014: 46-57).

Banyak kemudahan yang didapat jika menggunakan komputer, contoh sederhananya adalah hasil output pengolahan data lebih rapi jika dilakukan secara otomatis. Selain itu, proses pengolahan data dan transaksi ekonomi akan lebih cepat, dapat mempersingkat waktu. Sedangkan kelemahannya menurut Yosefrinaldi (2013), sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian *hardware* yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak.

Berdasarkan PP RI No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah Pasal 10 ayat 2 Penyelenggaraan SIKD mempunyai fungsi:

1. penyusunan standar *Informasi Keuangan Daerah*;
2. penyajian *Informasi Keuangan Daerah* kepada masyarakat;
3. penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian Informasi;
4. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi SIKD;
5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD;



6. pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi; dan
7. pengkoordinasian dan pertukaran informasi jaringan komunikasi data antar instansi Pemerintah.

Penjelasan umum PP RI No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah menyatakan pemerintah pusat maupundaerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

### **2.2.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Sistem pengendalian internal pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah.

Menurut (Mulyadi, 2010: 23) sistem pengendalian intern merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*intern accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative control*).

Menurut Mardi (2011: 59), Sistem Pengendalian Intern meliputi seluruh aspek yang ada dalam suatu perusahaan diantaranya struktur organisasi

dan segala kebijakan dalam suatu perusahaan yang saling berhubungan dengan tujuan untuk keamanan aset perusahaan, pemeriksaan informasi akuntansi, membantu memelihara kebijakan manajemen yang telah ditetapkan, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan.

Berdasarkan definisi diatas, sistem pengendalian internal merupakan aspek penting dalam perusahaan yang dikoordinasikan dengan baik untuk membantu perusahaan dalam mencapai suatu tujuan perusahaan.

### **2.2.3 Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Adapun unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan PP 60 tahun 2008 antara lain :

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

Dalam unsur lingkungan pengendalian, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif serta melalui hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

## 2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun tingkat kegiatan. Kemudian mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap resiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen resiko dan kegiatan pengendalian resiko yang diperlukan untuk memperkecil resiko

## 3. Kegiatan Pengendalian Intern

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko (PP 60 tahun 2008). Mahmudi (2010) menyebutkan, komponen penting yang terkait dengan sistem pengendalian intern khususnya kegiatan pengendalian antara lain :

### a. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah meliputi :

#### 1) Sistem dan prosedur penerimaan kas

- 2) Sistem dan prosedur pengeluaran kas
- 3) Sistem dan prosedur akuntansi selain kas
- 4) Sistem dan prosedur akuntansi asset

b. Otorisasi

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah dan ilegal.

c. Formulir, dokumen, dan catatan

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

d. Pemisahan tugas

Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pemegang uang dengan pencatat uang serta pengotorisasi.

4. Informasi Dan Komunikasi

Dijelaskan pula dalam PP 60 tahun 2008, bahwa instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan instansi pemerintah dan lainnya di seluruh instansi pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan SPI dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian



efektivitas SPI yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

### **2.2.2 Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Widyaningrum dan Rahmawati (2010) laporan keuangan merupakan bentuk tanggungjawab atas kepemilikan sumber daya ekonomi suatu perusahaan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu entitas harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dan dipertanggungjawabkan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas (Choiriyah, 2010: 9).

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan

ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan (Yosefrinaldi, 2013).

Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal (Ariesta, 2013: 53). (Arfianti 2011: 71) juga mengemukakan bahwa, informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang diisyaratkan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang memenuhi kualitas yang dikehendaki antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010): 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat dibandingkan, 4) Dapat dipahami.

### **2.2.3 Karakteristik Laporan keuangan**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Empat karakteristik kualitatif tersebut diantaranya :

## 1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

### a. Manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreks ekspektasi mereka dimasa lalu.

### b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

### c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

### d. Lengkap

Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

## 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara

jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan harus dapat diuji, dan jika dilakukan pengujian lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, maka hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

#### 4. Dapat dipahami

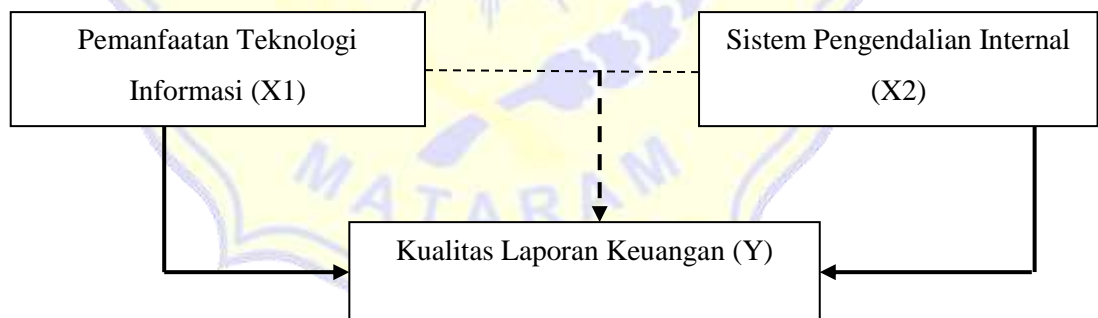
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

### 2.3 Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

#### 2.3.1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. Adapun gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1. : Rerangka Konseptual Penelitian**



**Keterangan :**

Parsial :  $\longrightarrow$

Simultan :  $\dashrightarrow$

(Sumber :Hamzah 2011: 65)



### 2.3.2. Pengembangan Hipotesis

#### 1. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian Winidyaningrum & Rahmawati (2010), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Zuliarti (2012), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian Yosefrinaldi (2013) dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

*H<sub>1</sub> : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah.*

## **2. Hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah.**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP), dalam PP tersebut mengungkapkan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya: (a) efektivitas dan efisiensi pencapaian kebijakan pemerintahan negara; (b) keandalan Laporan Keuangan; (c) pengamanan aset negara; dan (d) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Ariesta (2013), hasil evaluasi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa masih terdapat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini Tidak Wajar dan memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

*H<sub>2</sub> : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah.*

## **3. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah.**

Dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa situs adalah sebuah cara untuk menampilkan

profil pemerintah daerah di internet dengan tujuan antara lain menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat. Jaringan internet juga dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta pelayanan kepada masyarakat umum, salah satunya dengan kemudahan untuk mengakses profil pemerintah daerah melalui situs resmi pemerintah daerah terkait.

Sistem pengendalian internal pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditor yang ditanamkan dalam organisasi dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2010).

Yosefrinaldi (2013) dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian Yudianta & Erawati (2012), adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi

informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

*H<sub>3</sub> : Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah.*



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah sosial. Menurut Sugiono, 2011 (dalam skripsi Angki Aulia Muhammad, 2013) penelitian kuantitatif merupakan Metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme (kenyataan), sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan).

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014:69). Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui hubungan antara variabel bebas yaitu pemanfaatan teknologi informasi (X1) dan sistem pengendalian internal pemerintah (X2) terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) di Kota Mataram.

#### **3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **3.3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini ialah di 30 OPD di Kota Mataram.



### **3.3.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan melalui Observasi Awal pada tanggal 1 bulan januari tahun 2020, pelaksanaan lapangan atau survey lapangan di adakan pada tanggal 10 januari tahun 2020, dan penyeberan angket dilaksanakan dari tanggal 10-14 januari tahun 2020, adapun pelaksanaan pengumpulan data kuesioner atau di laksanakan pada tanggal 15-17 januari tahun 2020, dan pengolahan data telah di dilakukan pada tanggal 17-19 januari 2020.

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelola keuangan yang terdapat pada 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Mataram. Dengan kriteria responden adalah pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang terdiri dari:

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
4. Bendahara Penerimaan dan
5. Bendahara Pengeluaran.

Dari 30 OPD di Kota Mataram setiap OPD akan dipilih 4 pegawai yang akan menjadi responden sesuai dengan kriteria dibutuhkan, sehingga dapat disimpulkan jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 120.

### **3.4.2 Sampel**

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2014:80). Dalam penelitian ini keseluruhan jumlah populasi akan dijadikan sampel penelitian yaitu sebanyak 120 sampel.

## **3.5 Jenis dan Sumber Data**

### **3.5.1 Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2013). Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Mataram, jumlah karyawan, dan hasil kuesioner.

### **3.5.2 Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date* (Sugiyono, 2012:225). Data primer

dalam penelitian ini berasal dari hasil penyebaran kuesioner kepada pegawai bagian keuangan 30 OPD di Kota Mataram.

### **3.6 Definisi Operasional Variabel**

#### **3.6.1 Identifikasi Variabel**

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:59).

Berdasarkan pada permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka variabel-variabel yang dapat diidentifikasi adalah :

##### **1. Variabel Bebas**

Variabel independen juga disebut dengan variabel bebas yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat), (sugiyono, 2012). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi ( $X_1$ ) dan sistem pengendalian intern pemerintah ( $X_2$ ).

##### **2. Variabel Terikat**

Disini variabel dependen juga disebut dengan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas, Sugiyono, 2012). Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah (Y).

### 3.6.2 Definisi Operasional Variabel

#### 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_1$ )

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah. Indikator variabel pemanfaatan teknologi informasi dilihat dari:

- a. Penggunaan komputer
- b. Jaringan internet
- c. Sistem Informasi Akuntansi

Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan instrumen penelitian Nurillah (2014) dan Ningrum (2018) yang telah dimodifikasi kalimat pernyataannya. Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Skala 1 STS (Sangat Tidak Setuju), artinya pemanfaatan teknologi informasi sangat rendah. Skala 2 TS (Tidak Setuju), artinya pemanfaatan teknologi informasi rendah. Skala 3 N (Netral), artinya pemanfaatan teknologi informasi telah cukup. Skala 4 S (Setuju), artinya pemanfaatan teknologi informasi tinggi. Skala 5 SS (Sangat Setuju), artinya pemanfaatan teknologi informasi sangat tinggi.

#### 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( $X_2$ )

Pengendalian intern adalah suatu proses untuk memberikan arahan dan pengawasan serta memberikan keyakinan dan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada PP No. 60 Tahun 2008 indikator variabel sistem pengendalian intern pemerintah dilihat dari:

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian resiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan

Variabel sistem pengendalian intern pemerintah diukur dengan instrumen penelitian Ningrum (2018) yang telah dimodifikasi kalimat pernyataannya. Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Skala 1 STS (Sangat Tidak Setuju), artinya sistem pengendalian internal pemerintah sangat rendah. Skala 2 TS (Tidak Setuju), artinya sistem pengendalian internal pemerintah rendah. Skala 3 N (Netral), artinya sistem pengendalian internal pemerintah telah cukup. Skala 4 S (Setuju), artinya sistem pengendalian internal pemerintah tinggi. Skala 5 SS (Sangat Setuju), artinya sistem pengendalian internal pemerintah sangat tinggi.

### 3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat



diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan instrumen penelitian Ningrum (2018) yang telah dimodifikasi kalimat pernyataannya. Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Skala 1 STS (Sangat Tidak Setuju), artinya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat rendah. Skala 2 TS (Tidak Setuju), artinya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah rendah. Skala 3 N (Netral), artinya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah cukup. Skala 4 S (Setuju), artinya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tinggi. Skala 5 SS (Sangat Setuju), artinya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat tinggi.

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kuesioner. Kuesioner adalah serangkaian pertanyaan indikator yang ada dalam fokus penelitian, pertanyaan-pertanyaan tersebut mewakili semua bentuk aktivitas atau kegiatan dalam fokus penelitian. Teknik ini akan disediakan

sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang akan dijawab oleh responden yang telah ditemukan (Sugiyono, 2014:199). Dalam penelitian ini kuesioner akan diberikan kepada seluruh pegawai bagian keuangan yang terdapat pada 30 OPD di Kota Mataram.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

#### **3.8.1 Analisis Statistik dan Pengujian Hipotesis**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik menggunakan SPSS 16.0. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggambarkan rumus regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh beberapa variabel bebas dengan variabel terikat.

Pengujian Hipotesis dilakukan dengan uji simultan dan parsial. Kemudian penarikan kesimpulan dilaksanakan berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil pengujian hipotesis.

#### **3.8.2 Uji Kualitas Data**

##### **1. Uji Validitas**

Menurut Priyanto (2014:51) uji validitas *item* merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa cermat suatu sistem dalam mengukur apa yang ingin diukur. *Item* dapat dikatakan valid jika adanya korelasi yang signifikan dengan skor totalnya, hal ini menunjukkan adanya dukungan *item* tersebut dalam mengungkapkan suatu yang ingin diungkapkan item biasanya berupa pertanyaan atau pernyataan yang ditunjukkan kepada responden dengan menggunakan

bentuk kuesioner dengan tujuan untuk mengungkapkan sesuatu. Item pertanyaan dianggap valid jika nilai r-hitung atau nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar atau sama dengan nilai r-tabel ( $R_{hitung} \geq R_{tabel}$ ). Sebaliknya pertanyaan dianggap tidak valid jika nilai r-hitung atau nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih kecil daripada nilai r-tabel ( $R_{hitung} < R_{tabel}$ ). Nilai r-tabel diperoleh dari distribusi R dengan tingkat signifikan 0,05 dan  $df = \text{jumlah responden} - \text{jumlah variabel independen}$ . Perhitungan uji validitas dilakukan melalui program SPSS versi 16.0.

## 2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2011) uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur biasanya digunakan kuesioner. Metode yang biasa sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala rentangan (skala likert 1-5) adalah *croanbach alpha*. Uji reabilitas diukur dengan uji statistik *croanbach alpha* yaitu suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *croanbach alpha*  $> 0,60$ .

### 3.8.3 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data distribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Pada penelitian ini untuk menguji suatu data terdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan melihat nilai *Kolmogorov-Smirnov*. Uji

normalitas dilakukan dengan *Kolmogorov-Smirnov* dengan ketentuan bila nilai signifikan hitung  $> 0,05$ , berarti variabel berdistribusi normal dan sebaliknya bila nilai signifikan hitung  $< 0,05$ , berarti variabel tidak berdistribusi normal. (Ghozali, 2011).

## **2. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai VIF (Variance Inflation Factors) dan nilai toleransi. Jika nilai toleransi  $> 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $< 10$ , artinya tidak ada korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas (Ghozali, 2011).

## **3. Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Priyanto (2014:166) Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada sesuai pengamatan didalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas sedangkan jika variansi dari residual antara pengamatan satu dengan lainnya berbeda disebut heteroskedastitas.

Apabila variabel independensi signifikan secara statistik tidak mempengaruhi residual regresi maka tidak terdapat indikasi terjadi

heteroskedestisitas, untuk mengetahui uji statistik *scatterplot* dan uji residual statistik. Tidak terjadi Heteroskedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar dan kemudian menyempit) pada gambar *scatterplot*, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2011:155).

### 3.8.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggambarkan rumus regresi linear berganda. Menurut Sugiyono (2012:277) analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Untuk memprediksi nilai sebuah variabel dependen dari nilai beberapa variabel independen. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan.

X<sub>1</sub> = Variabel independen, yaitu pemanfaatan teknologi

X<sub>2</sub> = informasi.

a = Variabel independen, yaitu sistem pengendalian intern.

Intersep, konstanta yang merupakan rata-rata nilai Y pada

b<sub>1</sub> = saat nilai X<sub>1</sub>, dan X<sub>2</sub> = 0 .

Merupakan koefisien regresi parsial yang dipakai untuk



mengukur nilai rata-rata  $Y$  untuk tiap unit perubahan

$b_2 =$  dalam  $X_1$  dengan menganggap  $X_2$  konstan.

Merupakan koefisien regresi parsial yang dipakai untuk

mengukur nilai rata-rata  $Y$  untuk tiap unit perubahan

$e =$  dalam  $X_2$  dengan menganggap  $X_1$  konstan.

Nilai eror.

### 3.8.5 Pengujian Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data-data sampel (Sugiyono, 2014:84). Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

#### 1. Uji Koefisien determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinan ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil uji koefisien determinan ( $R^2$ ) menjelaskan seberapa besar kemampuan model antara pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dalam menjelaskan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Mataram.

## 2. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Priyanto, 2014). Kriteria masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Priyanto, 2014) :

- a. Jika nilai t hitung  $\leq$  t-tabel maka hipotesis  $H_0$  diterima dan ( $H_a$  ditolak), artinya bahwa pemanfaatan teknologi informasi (tidak memiliki) pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- b. Jika nilai t hitung  $>$  t-tabel maka hipotesis ( $H_0$ ) ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- c. Nilai t-tabel diperoleh dari distribusi T dengan tingkat signifikan 0,05 dan DF (Derajat Kebebasan) = jumlah responden – jumlah variabel independen. Perhitungan uji statistik t dilakukan melalui program SPSS versi 16.0.

## 3. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas mempengaruhi variabel dependen (Priyanto, 2014:154). Kriteria variabel independen atau bebas mempengaruhi variabel dependen (Priyanto, 2014:154) :

- a. Jika nilai f-hitung  $>$  f-tabel maka hipotesis ( $H_0$ ) ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem

pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

- b. Jika nilai  $f\text{-hitung} \leq f\text{-tabel}$  maka hipotesis ( $H_0$ ) diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Nilai  $f\text{-tabel}$  diperoleh dari distribusi F dengan tingkat probabilitas 0,05 dan DF (Derajat Kebebasan) = jumlah variabel independen ; jumlah responden – jumlah variabel independen. Perhitungan uji statistik  $f$  dilakukan melalui program SPSS versi 16.0.

